



LAPORAN TAHUNAN BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 2018



www.bandung.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Visi

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi

**Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri; dan
Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.**

Tujuan Strategis

**Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara; dan
Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.**



Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

RENCANA STRATEGIS BPK RI 2016 - 2020

Renstra BPK 2016-2020 merupakan kelanjutan dari Renstra BPK 2011-2015, sehingga kondisi pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2015 menjadi salah satu pertimbangan penyusunan Renstra ini. Pertimbangan lain meliputi landasan pemikiran, perkembangan lingkungan strategis serta kondisi yang diharapkan dicapai lima tahun ke depan.

Renstra BPK 2016-2020 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di BPK. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di BPK untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta target-target pengukurannya.

Kondisi yang diharapkan dalam Renstra BPK 2016-2020 terkait dengan peningkatan peran BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Peningkatan tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK modern yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.



MARS & HYMNE BPK

MARS BPK

Wahai Sang Abdi Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Hayatilah Dan Amalkan
Pengabdianmu
Dengan Menjunjung Tinggi
Independensi
Integritas Dan Profesionalisme
Memeriksa Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab
Keuangan Negara
Demi Bangsa Indonesia
Tanah Air Tercinta
Kami Siap Jiwa Dan Raga
Mengabdikan Untuk Negara
Tegar
Takkan Gentar
Menjaga Dan Mengayomi Harta
Negara
Dengan Semangat Pancasila
(Kembali Ke Awal)
Dengan Semangat Pancasila

HYMNE BPK

Kami Sang Abdi Negara
Mengemban Tugas Mulia
Untuk Tanah Air Tercinta
Demi Bangsa Indonesia

Kami Siap Jiwa Dan Raga
Mengabdikan Untukmu Negara
Tegar Takkan Pernah Gentar
Menjaga Harta Negara
Dengan Semangat Pancasila
Kami Sang Abdi Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Bersumpah Demi Hati Yang Kuat
Selalu Ada Untukmu Indonesia

(Reff)

**Kami Siap Jiwa Dan Raga
Mengabdikan Untukmu Negara
Tegar Takkan Pernah Gentar
Menjaga Harta Negara
Dengan Semangat Pancasila
(Back To Reff)**

Dengan Semangat Pancasila (2x)

Daftar Isi

Visi.....	1
Misi	1
Tujuan Strategis	1
Rencana Strategis BPK RI 2016 – 2020.....	2
Tugas Dan Wewenang Anggota BPK	5
Pengantar Kepala Perwakilan.....	11
Struktur Organisasi.....	13
Profil Pejabat Struktural.....	14
Grafis Sumber Daya Manusia BPK	18
Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2018.....	18
Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2018.....	22
Anggaran Dan Realisasi	26
Sarana Dan Prasarana Perwakilan	27
Telaah Hukum Perwakilan	28
Pusat Informasi dan Komunikasi Jabar.....	30
Publikasi.....	31
Kaleidoskop BPK 2018	32

TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA BPK

No.	Pimpinan BPK	Tugas dan Wewenang	Objek Tugas dan Wewenang
1.	Ketua (merangkap Anggota)	Melaksanakan: • Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua; • Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK; • Hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri; • Pembinaan pemeriksaan investigatif bersama dengan Wakil Ketua; dan • Pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.	Pelaksanaan BPK dan para pemangku kepentingan
2.	Wakil Ketua (merangkap Anggota)	Melaksanakan: • Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua; • Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dan Inspektorat Utama; • Proses Majelis Tuntutan Pembendaharaan; • Pembinaan pemeriksaan investigatif bersama dengan Ketua; dan • Pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama Ketua.	Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan
3.	Anggota I	• Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan • Memberikan pengarahan	Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Pertahanan;

		pemeriksaan investigatif.	Kementerian Perhubungan; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara RI; Badan Intelijen Negara; Badan Narkotika Nasional; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; Lembaga Ketahanan Nasional; Lembaga Sandi Negara; Komnas HAM; Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; KPU (termasuk KPU Daerah Prov/Kab/Kota); Badan SAR Nasional; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum; Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
4.	Anggota II	• Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan • Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Keuangan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS; Kementerian Koperasi dan UKM; Badan Koordinasi Penanaman Modal; Badan Pusat Statistik; Bank Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk pengelolaan aset-aset eks BPPN oleh Kemenkeu); Lembaga Penjamin Simpanan; Badan Standardisasi Nasional; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
5.	Anggota III	• Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan • Melaksanakan koordinasi pemeriksaan investigatif	MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY; Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sekretariat Negara; Sekretariat Kabinet; Kementerian Sosial; Kementerian Pariwisata;

			Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Badan Tenaga Nuklir Nasional; Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; Perpustakaan Nasional RI; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Kepegawaian Negara; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Lembaga Administrasi Negara; Arsip Nasional RI; Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karni Jakarta; Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja; Lembaga Penyiaran Publik RRI; Lembaga Penyiaran Publik TVRI; Taman Mini Indonesia Indah; Badan Informasi Geospasial; Ombudsman RI; Badan Pertahanan Nasional; Badan Ekonomi Kreatif; Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
6.	Anggota IV	Melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan	Kemenko Bidang Kemaritiman; Kementerian Pertanian;

		negara; dan • Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif	Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Badan Pengatur Hilir Migas; Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; Lembaga yang di bentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
7.	Anggota V	• Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; • Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah; dan • Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif	Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang; Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam; Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura; Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Lembaga yag dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I, yang terdiri atas: Provinsi Aceh; Provinsi Sumatera Utara; Provinsi Sumatera Barat; Provinsi Riau; Provinsi Kepulauan Riau; Provinsi Jambi; Provinsi Sumatera Selatan; Provinsi Bengkulu; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Provinsi Lampung; Provinsi Banten; Provinsi Jawa Barat; Provinsi DKI Jakarta; Provinsi Jawa Tengah; Provinsi DI Yogyakarta; Provinsi Jawa Timur; Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
8.	Anggota VI	• Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; • Melaksanakan pemeriksaan	Badan Pengawas Obat dan Makanan; Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.

		pengelolaan dan tanggung jawan keuangan daerah; dan • Memberikan pengarahan pemeriksaan inestigatif	Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II, yang terdiri atas: Provinsi Bali; Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi Nusa Tenggara Timur; Provinsi Kalimantan Barat; Provinsi Kalimantan Tengah; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Sulawesi Barat; Provinsi Sulawesi Selatan; Provinsi Sulawesi Tengah; Provinsi Sulawesi Tenggara; Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Gorontalo; Provinsi Maluku; Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
9.	Anggota VII	• Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; • Pemeriksaan investigatif	Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan; Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan; Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.

LAMBANG BPK



Lambang BPK
Periode 1993 s.d. Skrg

BPK telah mengalami empat kali perubahan lambang di mulai pada periode pertama pada tahun 1961 hingga terakhir pada tahun 1993. Pada lambang BPK terdapat tulisan Tri Dharma Arthasanthosa. Tulisan tersebut bermakna misi BPK dalam mencapai tiga keberhasilan, yaitu ketaatan dan ketertiban dalam administrasi keuangan, ekonomis, efisien dan efektif dalam pencapaian sasaran program, guna terwujudnya pertanggungjawaban keuangan Negara yang semakin sempurna.

Pemilihan Cakra, lambang senjata Betara Wisnu, merupakan gambaran harapan agar BPK dapat menjadi institusi yang ampuh dalam menjaga pengelolaan keuangan negara, sebagaimana senjata tokoh penting dalam pewayangan tersebut. Bunga teratai berkelopak tujuh yang menopang cakra, dikenal sebagai Padsama. Tahta bunga teratai melambangkan kebersihan, kesucian dan keluhuran lahir batin, sedangkan tujuh buah kelopak teratai menggambarkan landasan pelaksanaan tugas BPK (Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa) yang masing-masing berjumlah tujuh butir. Tiga mata tombak melambangkan ruang lingkup pemeriksaan BPK, yaitu ketertiban dan ketaatan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan Negara, daya guna (efisiensi) dan kehematan (ekonomis), serta keefektifan hasil program.



Pengantar Kepala Perwakilan

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat ijin-Nya, kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya bagi bangsa dan negara atas nama BPK.

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis BPK 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan serangkaian program kegiatan. Program tersebut diwujudkan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta kegiatan pendukung dan penunjang pemeriksaan.

Laporan tahunan 2018 yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini merupakan media informasi kinerja Perwakilan selama tahun 2018. Capaian tersebut tentunya tidak dapat diraih tanpa melalui kerja sama yang baik antara seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, Laporan Tahunan 2018 ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian Perwakilan selama tahun 2018, tetapi juga menjadi motivator penggerak guna tercapainya kinerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Utamanya, Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat semakin terpacu untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, serta mewujudkan mutu kelembagaan BPK modern yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2016 – 2020.

Dengan segala keterbatasan kemampuan yang ada, kami sampaikan Laporan Tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Semoga bermanfaat.

Bandung, Desember 2018

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Arman Syifa



MAJLIS DA'IRAT KASAB PANGUNG
dan KAWASAN KOTA PANGUNG
**SERAWAT MENUNJUK IBU BUAH
DI BULAN RAJABADHAN 1437 H**
Wahyuni Iyus Ropandjari

BPK

OVINS



STRUKTUR ORGANISASI



PROFIL PEJABAT STRUKTURAL



Lahir di Garut, 04 April 1969 dan menyelesaikan pendidikan D-3 Akuntansi STAN pada tahun 1991, dan D-4 STAN pada tahun 1997, kemudian menyelesaikan pendidikan S-2 Magister Akuntansi (*Master of Accountancy*) Case Western Reserve University pada tahun 2001.

Memulai karier di BPK pada tahun 1990 sebagai Administrasi Umum pada Sekretariat Jenderal BPK RI di Jakarta. Pernah menjadi Auditor Pelaksana dan Auditor ahli Pertama serta Pemeriksa Madya pada Auditorat Utama Keuangan Negara I, Kepala Sub Auditorat dan sekarang menjabat sebagai Kepala Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



Lahir di Magelang, 08 Juni 1969 dan bergabung dengan BPK RI pada tahun 1996. Pada tahun 1994 menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan Pascasarjana Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 09 Desember 2009. Jabatan yang pernah dipegang sebelumnya adalah Kepala Seksi BUMN Industri Strategi-2 tanggal 13 September 2006, Kepala Seksi VII.B.3.1 tanggal 24 Agustus 2007, Kepala Sub Auditorat VII.D.3 tanggal 06 Maret 2009, menjabat sebagai Kepala Subauditorat Aceh III, tanggal 25 Maret 2013, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subauditorat Jawa Barat I pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



Lahir di Magetan pada tanggal 25 Maret 1964. Menyelesaikan pendidikan S-1 Manajemen di Universitas Taman Siswa pada tahun 1992 dan S-2 Manajemen di Universitas Budi Luhur pada tahun 2006. Memulai karier di bpk pada tahun 1993 sebagai Administrasi Umum pada Sekretariat Jenderal BPK RI di Jakarta. Jabatan yang pernah dipegang sebelumnya adalah Kepala Seksi Mabes Polri & BMN pada Auditorat Keuangan Negara I, Kepala Seksi I.B.3.3 pada Auditorat Utama Keuangan Negara I, Kepala Sub Auditorat I.C.3 pada Auditorat Utama Keuangan Negara I, Kepala Sekretariat Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan sejak akhir bulan Januari 2018 menjabat sebagai Kepala Subauditorat Jawa Barat II.



Lahir di Jakarta pada tanggal 02 Desember 1973. Menyelesaikan D-3 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1996, S-1 Akuntansi di Universitas Brawijaya pada tahun 2001 dan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Indonusa Esa Unggul pada tahun 2016. Memulai karier di BPK pada tahun 1999 sebagai Administrasi Umum pada Auditorat Utama Keuangan Negara I. Jabatan yang pernah dipegang sebelumnya adalah Ketua Tim Senior pada Auditorat Utama Keuangan Negara I, Kepala Seksi I.B.3.1 pada Auditorat Utama Keuangan Negara I, Pengendali Teknis pada Subauditorat Jabar II BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subauditorat Jawa Barat III pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



Lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 1962. Menyelesaikan pendidikan S-1 Ekonomi Perusahaan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada tahun 1988. Memulai karier di BPK pada tahun 1993 sebagai Administrasi Umum di Biro Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal BPK RI di Jakarta. Jabatan yang pernah dipegang sebelumnya adalah Kepala Seksi Komando Utama TNI AD pada Auditorat Keuangan Negara I, Kepala Sub Bidang Pengawasan Khusus pada Inspektorat Utama, Kepala Bidang I.C pada Inspektorat Utama, Kepala Sekretariat Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sejak akhir Januari 2018 menjabat sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



Lahir di Jakarta pada 26 November 1976. Menyelesaikan pendidikan S-1 Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2000. Memulai karier di BPK pada tahun 2003 sebagai Administrasi Umum di Biro Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Jenderal BPK RI. Jabatan yang pernah diemban sebelumnya sebagai Kepala Subbagian SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



DONI ADI PRADANA

Kasubbag. Hukum

Lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1968. Menyelesaikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Pancasila pada tahun 1993 dan S-2 Manajemen di STIE IGI pada tahun 2000. Memulai karier di BPK pada tahun 1996 sebagai Administrasi Umum pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal BPK RI di Jakarta. Jabatan yang pernah diemban antara lain Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas di BPK Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Subbagian Hukum di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Hukum di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



ANTHON M.

Kasubbag. SDM

Lahir di Palembang pada tanggal 16 Mei 1981. Menyelesaikan pendidikan S-1 Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2004. Memulai karier di BPK pada tahun 2007 sebagai Auditor Ahli Pertama pada Auditorat Utama Keuangan Negara VII BPK RI. Jabatan yang pernah diemban antara lain Kepala Subbagian Sekretariat Wakil Ketua pada Biro Setpim BPK RI, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



ELLI HARTELI D.

Kasubbag. Keuangan

Lahir di Bandung pada 08 April 1964. Menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Padjajaran pada tahun 1988. Memulai karier di BPK pada tahun 1990 sebagai Administrasi Umum pada Oditorat B BPK RI. Jabatan yang pernah diemban antara lain Kepala Sub Bagian Verifikasi, Kepala Sub Bagian Pembukuan, Kepala Subagian Akuntansi I, Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I di Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal BPK RI dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



WAWAN HADIWAN

Kasubbag. Umum
dan TI

Lahir di Bandung pada tanggal 04 Juli 1962. Menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Veteran Republik Indonesia pada tahun 1992. Memulai karier di BPK pada tahun 1996 sebagai Pemeriksa pada Perwakilan BPK RI di Makassar. Jabatan yang pernah diemban antara lain Kepala Subbagian Umum dan TI pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Subbagian Sekretariat Wakil Ketua pada Biro Setpim dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan TI di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



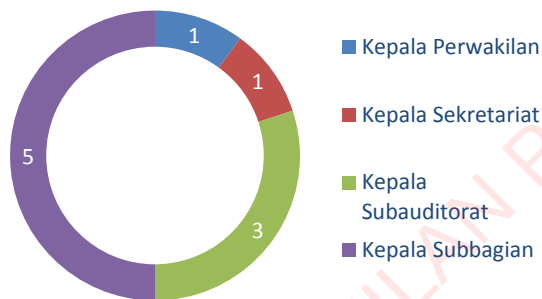


Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

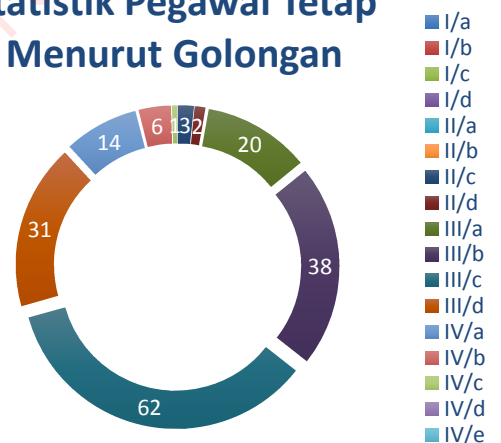
GRAFIS SUMBER DAYA MANUSIA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 2018

Berikut merupakan data Bezzeting Subbagian Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat per 30 November 2018. Jumlah pegawai tetap sebanyak 177 orang, dengan jumlah laki-laki 116 orang dan perempuan 61 orang.

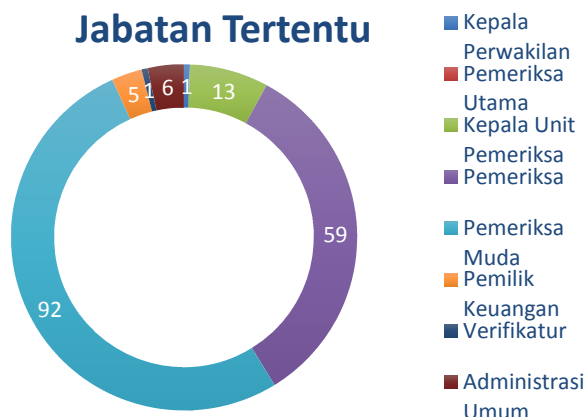
**Statistik Pegawai Tetap
Menurut Jabatan Struktural**



**Statistik Pegawai Tetap
Menurut Golongan**

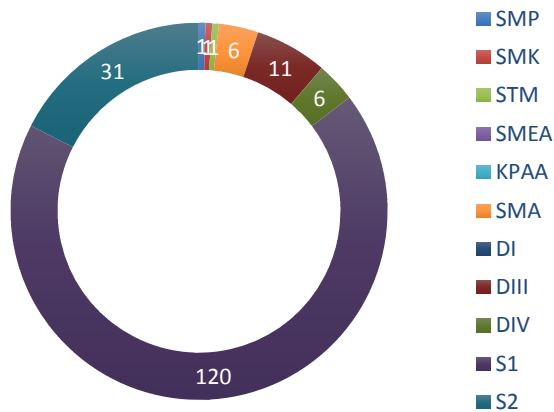


**Statistik Pegawai Tetap Menurut
Jabatan Tertentu**

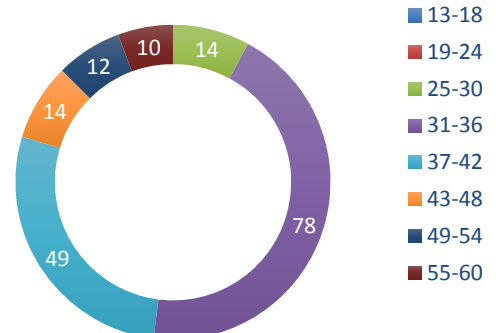




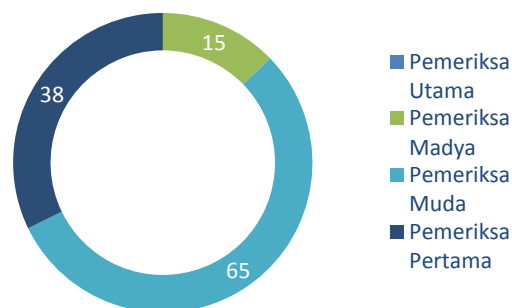
Statistik Pegawai Tetap Menurut Jenjang Pendidikan



Statistik Pegawai Tetap Menurut Umur



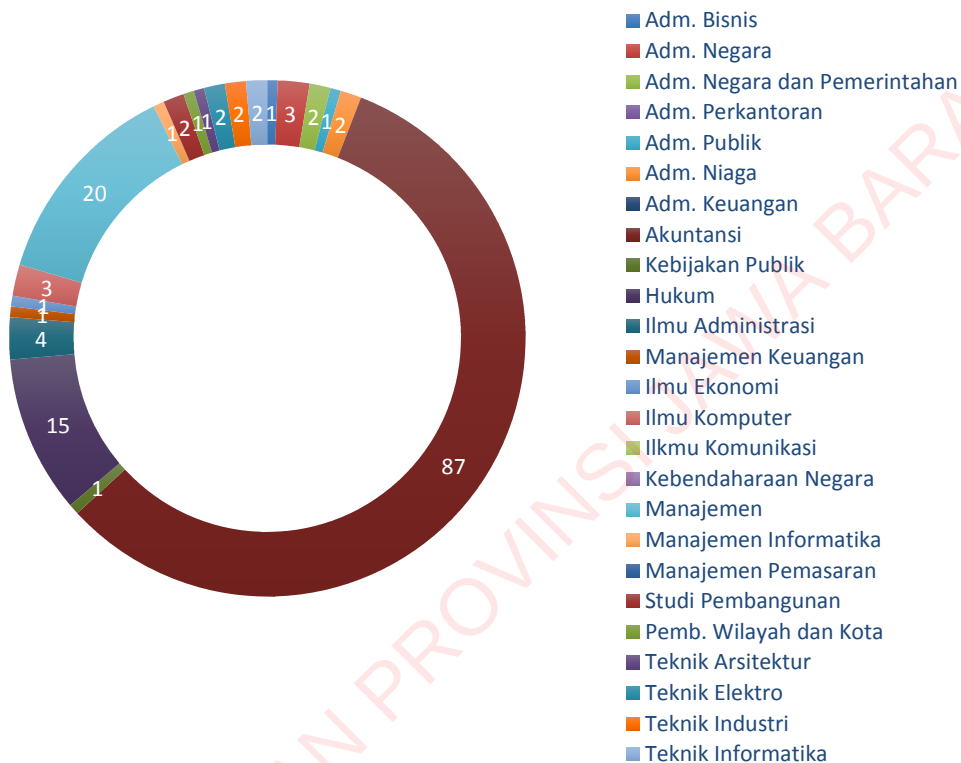
Statistik Pegawai Tetap Menurut Jabatan Fungsional Pemeriksa



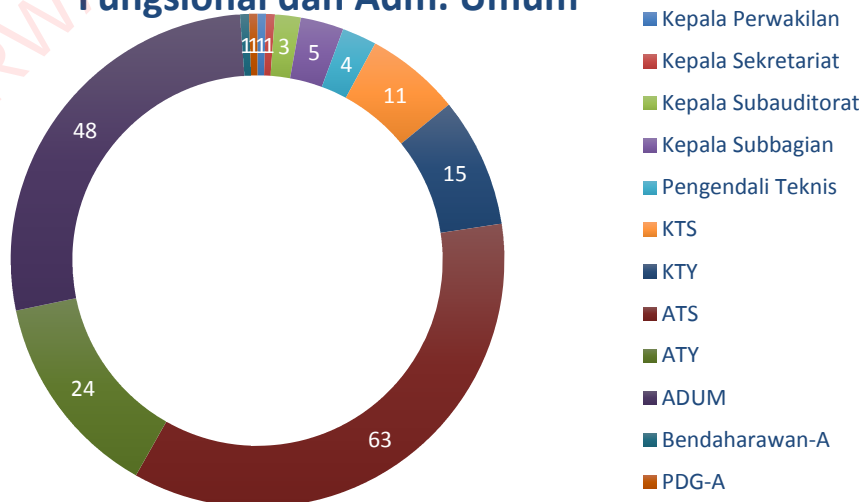


Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Statistik Pegawai Tetap Menurut Jurusan (DI/DIII/DIV/S1/S2)

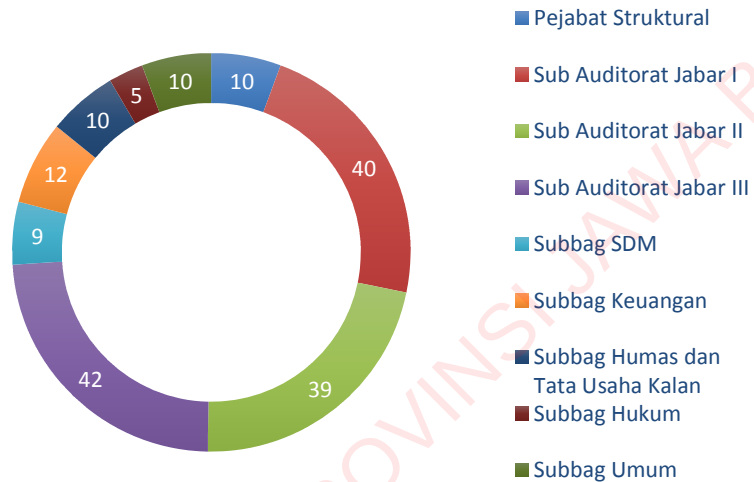


Statistik Pegawai Tetap Menurut Jabatan Struktural, Fungsional dan Adm. Umum





**Statistik Pegawai Tetap Menurut Unit Kerja
Perwakilan**



KINERJA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 2018





Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan BPK RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Sub Auditorat Jawa Barat I

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi dan Kabupaten Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

2. Sub Auditorat Jawa Barat II

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

3. Sub Auditorat Jawa Barat III

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

4. Sekretariat Perwakilan

Bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasi dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Perwakilan membawahi Subbag Humas dan Tata Usaha, Subbag SDM, Subbag Hukum, Subbag Keuangan, serta Subbag Umum dan Teknologi Informasi



Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Pengukuran Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	68,50%	105
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102%	102
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	105
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	21,74%	105
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	105
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	100
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	91,07%	91,07
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%	100%	100
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,23	103,17
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	98,65%	98,65
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	3,83	76,60
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,47	89,40
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	88,89
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	82,68%	103,36
	IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun	1	0	0
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%	100
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	96,65	101,73
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3	3,90	105
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	82,76	97,36



Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

ANGGARAN DAN REALISASI

Pada tahun 2018, Perwakilan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 41.530.817.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 40.070.209.456 dengan persentase 96,48%. Berikut merupakan perbandingan anggaran dan realisasi secara rinci.

Output		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1.	Rumusan Bahan Pendapat	21.540.000,00	20.772.097,00	96,43%
2.	Layanan Administrasi Pemeriksaan	1.378.473.000,00	1.363.055.351,00	98,88%
3.	Sumbangan IHPS	161.210.000,00	160.134.120,00	99,33%
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh KAP Untuk Dan Atas Nama BPK	1.813.546.000,00	1.405.894.000,00	77,52%
5.	LHP BPK Perwakilan Prov. Jabar	17.119.433.000,00	16.473.895.766,00	96,23%
6.	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Jabar	1.135.512.000,00	965.430.324,00	85,02%
7.	Laporan Profil Entitas	48.111.000,00	45.141.702,00	93,83%
8.	Layanan Sekretariat Perwakilan	2.070.666.000,00	2.026.735.028,00	97,88%
9.	Layanan Internal (Overhead)	70.971.000,00	70.770.000,00	99,72%
10.	Layanan Perkantoran	17.711.355.000,00	17.538.381.104,00	99,02%
Total		41.530.817.000,00	40.070.209.456,00	96,48%



SARANA DAN PRASARANA PERWAKILAN

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.217.660.961,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.215.696.351,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp.1.964.610,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	161.699.214,00	10.961.671,00	172.660.885,00
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	0,00	274.750,00	274.750,00
117114	Suku Cadang	4.664.600,00	-1.526.300,00	3.138.300,00
117131	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
117199	Persediaan Lainnya	49.332.537,00	7.745.511,00	41.587.026,00
JUMLAH		215.696.351,00	1.964.610,00	217.660.961,00

Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan :

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1.	Persediaan	217.660.961,00	217.660.961,00	0,00
2.	Tanah	165.777.099.000,00	165.777.099.000,00	0,00
3.	Peralatan dan Mesin	33.965.258.484,00	33.965.258.484,00	0,00
4.	Gedung dan Bangunan	59.966.907.020,00	59.966.907.020,00	0,00
5.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.114.128.307,00	14.114.128.307,00	0,00
6.	Aset Tetap Lainnya	194.274.522,00	194.275.522,00	0,00
7.	KDP	0,00	0,00	0,00
8.	Aset Tak Berwujud	680.634.440,00	680.634.440,00	0,00
9.	Aset Lain-lain*)	211.326.830,00	211.326.830,00	0,00
Total		275.127.289.564,00	275.127.289.564,00	0,00

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah



Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

TELAAH HUKUM PERWAKILAN

Permintaan Pendapat Hukum Periode Januari s.d Maret 2018

NO.	Uraian Permintaan pendapat hukum/konsultasi/kajian hukum	Nota Dinas Permintaan/Disposisi	
		Nomor dan tanggal	Asal Surat
1	2	3	4
PENDAPAT HUKUM			
1	Telaah Hukum atas Laporan bulanan PPAT/Notaris	Nota Dinas Nomor 2/ND/XVIII.BDG.4/01/2018 tanggal 2 Januari 2018	Kepala Sub Auditorat Jabar III
2	Telaah Hukum atas Status TGR yang Dianggap Selesai	Nota Dinas Nomor 7/ND/XVIII.BDG.4/01/2018 tanggal 12 Januari 2018	Kepala Sub Auditorat Jabar III
3	Pendapat Hukum atas Pemberian Honorarium kepada Tim Pendampingan Dana Desa Kabupaten Cirebon		Kepala Sub Auditorat Jabar II
4	Pendapat Hukum terhadap Temuan Pemeriksaan atas LHP Pemkab Sumedang Tahun 2016 dengan judul Kekurangan Volume atas Beberapa Item Pekerjaan Dukungan PON XIX Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua		Kepala Perwakilan
KONSULTASI HUKUM			
1	Konsultasi perihal Honorarium Tim Pendampingan Dana Desa Kabupaten Cirebon	Surat Nomor 141/143/Pemdes tanggal 25 Januari 2018 tanggal 2 Januari 2018	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Cirebon

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Permintaan Pendapat Hukum Periode April s.d Juni 2018

NO.	Uraian Permintaan pendapat hukum/konsultasi/kajian hukum	Nota Dinas Permintaan/Disposisi	
		Nomor dan tanggal	Asal Surat
1	2	3	4
	PENDAPAT HUKUM		
1	Kajian Hukum terkait Pemeriksa Eksternal dalam Pengelolaan Keuangan BLUD	Nota Penyampaian tanggal 23 Mei 2018	Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan LKPD Kabupaten Ciamis
2	Pendapat Hukum atas Temuan Pemeriksaan dalam LHP LKPD TA 2017 pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat	Nota Dinas Nomor 50/ND/XVIII.BDG.2/05/2018 tanggal 30 Mei 2018	Kepala Sub Auditorat Jabar I
	KONSULTASI HUKUM		
1	Permohonan Kajian dan Masukan atas Konsep Perjanjian Kerjasama dari Universitas Islam Bandung (UNISBA)	Nota Dinas Nomor 136/ND/XVIII.BDG.1.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018	Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha

Permintaan Pendapat Hukum Juli s.d September 2018

NO.	Uraian Permintaan pendapat hukum/konsultasi/kajian hukum	Nota Dinas Permintaan/Disposisi	
		Nomor dan tanggal	Asal Surat
1	2	3	4
	PENDAPAT HUKUM		
1	Pendapat Hukum atas Terkait Keuangan Negara Dalam Proses Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Konsinyasi)	Nota Dinas Nomor 43A/ND/XVIII.BDG.3/09/2018 tanggal 21 September 2018	Kepala Sub Auditorat Jabar II



Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI JABAR

Permintaan Informasi Publik 2018			
1.	Klasifikasi Pemohon		
	Mahasiswa	89	34,23%
	Instansi (APH, Kanwil, BPKP)	4	1,54%
	Parpol	0	0%
	Perseorangan	135	51,92%
	Media	10	3,85%
	LSM	22	8,46%
2.	Data yang Dimohonkan		
	LHP	125	48,08%
	Non LHP	135	51,92%
3.	Mekanisme Permohonan		
	Surat	139	38,85%
	Datang Langsung	101	53,46%
	Email/web	20	7,69%
4.	Pemenuhan Data yang Dimohonkan		
	Dipenuhi	259	99,62%
	Ditolak	1	0,38%

Pengaduan Masyarakat 2018			
1.	Klasifikasi Pengadu		
	Individu	11	36,67%
	Badan Hukum	12	40,00%
	Kelompok Orang	7	23,33%
2.	Topik Pengaduan		
	Permohonan Pemeriksaan	2	6,67%
	Informasi Penyimpangan	22	73,33%
	LHP	0	0%
	Kepegawaian	0	0%
	Lain-lain	6	20,00%
3.	Mekanisme Pengaduan		
	Surat	25	83,33%
	Datang Langsung	0	0%
	Web	0	0%
	Email	5	16,67%
4.	Tindak Lanjut		
	Proses Penelaahan	2	6,67%
	Belum Ditanggapi	0	0%
	Selesai	28	93,33%

PUBLIKASI

Jumlah pengaduan masyarakat	30 Surat/dokumen
Jumlah permintaan informasi publik	260 Permintaan
Jumlah kegiatan <i>media relations</i>	7 Kegiatan



Go To School SMAN 2 Cimahi - 15 Agustus 2018



Media Workshop – 08 November 2018



TV Talkshow – 18 Desember 2018

KALEIDOSKOP BPK 2018



JANUARI 2018



Company Gathering
Jawa Barat

FEBRUARI 2018



MARET 2018



APRIL 2018



MEI 2018



JUNI 2018

D BAITUL HASIB BANDUNG
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
Yaa Ramadhan 1439 H
KULTUM RAMADHAN BERBAGI
PALAPAK BUKBER



ENVIRONMENTAL ACCORDION
THE 18th ASSEMBLY MEETING OF
INTOSAI

16 July 2018, Ban

JULI 2018



**PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
MENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK**
SEMESTER I TAHUN 2018
BANDUNG, 10 - 12 JULI 2018



AGUSTUS 2018



SEPTEMBER 2018



OKTOBER 2018



NOVEMBER 2018



**PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
PENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK
SEMESTER II TAHUN 2018**



BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Jl Moch Toha No.164 Bandung 40243

Telp./Fax.022-5207294/022-52078928